

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telepon (0711) 311089 Faximile (0711) 311089 Kode Pos 30126 Email dikmentisumsel@yahoo.com Webside www.disdik.sumselprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor: 420/7090 /SMA.3/Disdik.SS/2020

TENTANG PERPANJANGA IZIN OPERASIONAL SMA YPNH TANAH ABANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan permohonan dari sekolah yangb bersangkutan dan hasil pemeriksaan Dokumen dan syarat-syarat lainnya oleh petugas verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, maka SMA YPNH TANAH ABANG dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional SMA YPNH TANAH ABANG:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 - 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional: a. Nama: SMA YPNH TANAH ABANG

b. Alamat : Jln. Raja I Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI

KEDUA

: Perpanjangan Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020 s.d 18 Agustus 2023

KETIGA

: Sekolah yang memiliki Surat Pemegang Surat Izin Operasional ini :

- Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
- 2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.

3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

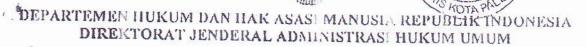
KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Worpris di Palembang

RENNY ASTUTI, SH.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MAN USIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-340.A E.01.04, Tahon. 2009

TENTZ NG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA I EPUBLIK INDONESIA,

Membaca

Surat permohonan dari Notaris Reme Astuti, SH nomor 21/01/2009 tanggal 21 Januari 2009 perihal permohonan pengesahan Yayasan Perguruan Nurul Huda Tanah Abang (YPNHTA) yang diterima tanggal 02 Pebruari 2009;

Menimbang:

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatus dalam peraturan perandang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4/32) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUT ISKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PERGURUAN NURUL HUDA TANAH ABANG disingkat YPNITI A NPWP: 21.052.303.1-313.000

berkedudukan di Jalan Pertamina Desa III, Kelurahan Tanah Abang Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Salatan, sesuai dengan Akta Nomor 144 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Renny Astuti, SH Berkedudukan di Kota Palembang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetap an di Jakarta

pada tanggal 05 Pebruari 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTEK MODIFIEL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

AKSANA HARIAN

JL BARI AZED, SH. MH

NIP 130 610 869